

PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Enny Kartini

IKIP PGRI Kalimantan Timur
ennykartini@ikippgrikaltim.ac.id

ABSTRAK

Peguruan Tinggi Swasta merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan pendidikan yang berprinsip nirlaba. Dana yang diperoleh berasal dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan layanan pendidikan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi PTS. Meskipun PTS sebagai organisasi nirlaba yang tidak berorientasi keuntungan tetapi tetap saja ukuran keberhasilan pengelolaan PTS adalah adanya sisa hasil usaha setiap akhir periode yang menunjukkan nilai surplus artinya dana yang dikumpulkan mampu melebihi biaya operasional pendidikan. Kecukupan dana untuk melaksanakan kegiatan, baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nirlaba, tidak hanya tergantung dari banyaknya dana yang dapat dikumpulkan, tetapi juga dari kemampuan mengelola dana tersebut sehingga untuk itulah diperlukan manajemen keuangan karena manajemen keuangan mempunyai peranan secara umum yaitu fungsi pendanaan dan fungsi investasi serta pemanfaatan sisa hasil usaha untuk pengembangan PTS kedepannya.

Kata Kunci: Manajemen, keuangan, organisasi, nirlaba

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan masyarakat sebagai pendirinya melalui pembentukan Badan Penyelenggara berbadan hukum yang mempunyai tujuan utama bukan untuk memperoleh keuntungan tetapi berupaya untuk memberikan pelayanan dibidang pendidikan yang berkualitas sehingga kegiatan yang dilakukan mempunyai prinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam pasal 21 disebutkan tentang pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:

- a. otonomi Perguruan Tinggi;
- b. pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. tata kelola Perguruan Tinggi; dan
- d. akuntabilitas publik.

Pasal berikutnya menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu otonomi dibidang akademik dan nonakademik. Sedangkan Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka PTS dapat mengelola sendiri lembaganya dalam bidang akademik dan nonakademik. Khusus untuk pengelolaan bidang nonakademik yang dimaksud di sini salah satunya adalah masalah pengelolaan dibidang keuangan. Semua kegiatan pelayanan pendidikan PTS pada awalnya membutuhkan dana investasi yang bersumber dari masyarakat yang berbadan hukum, oleh sebab itu dalam mengelola keuangan lembaga, PTS harus mampu memaksimalkan nilai Perguruan Tingginya yang mempunyai arti bahwa Perguruan Tinggi yang dikelola mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemanfaatan dana yang diamanatkan kepada

pengelola PTS untuk mampu mempertahankan kelangsungan hidup Perguruan Tinggi dan terus berkembang sehingga PTS memiliki nilai tambah dalam pandangan masyarakat pengguna jasa pendidikan pada PTS tersebut. Hal ini akan tercapai, salah satunya adalah adanya kemampuan PTS dalam mengelola keuangan lembaga melalui manajemen keuangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan membahas tentang peranan manajemen keuangan dalam pengelolaan PTS mulai dari konsep tentang manajemen keuangan PTS, siklus manajemen keuangan Perguruan Tinggi, metode penetapan biaya satuan pendidikan, Prinsip manajemen keuangan PTS serta Bentuk rasio kinerja dalam manajemen keuangan Perguruan tinggi yang menunjukkan berhasil atau tidaknya kinerja yang telah dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

III. HASIL PENELITIAN

Konsep Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Perguruan Tinggi (PT) mempunyai dimensi korporasi, hal ini dapat tergambar pada kegiatan yang dilakukan oleh PT yaitu penjualan produk berupa jasa dalam bentuk layanan pendidikan kepada pelanggan primer yang disebut sebagai mahasiswa, mensejahterakan pelanggan intern yaitu SDM yang ada dalam PT serta memberikan kepuasan kepada pelanggan eksternal lainnya yaitu masyarakat pemakai tenaga lulusan Perguruan Tinggi. PT harus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar dapat memenangkan persaingan dengan PT lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Selain itu, Perguruan Tinggi perlu melakukan analisis titik impas (*break even point analysis*) terhadap jumlah mahasiswa yang minimal harus diterima agar tidak terjadi defisit pendanaan dalam kegiatan operasional PT, oleh karena itu diperlukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan jasa berupa layanan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang memutuskan menjadi mahasiswa di PT tersebut semakin bertambah dan diharapkan melebihi jumlah minimal mahasiswa yang harus diterima.(Indrajit dan Djokopranoto, 2004)

Berdasarkan uraian di atas, maka PTS sebagai salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi juga mempunyai dimensi korporasi seperti yang dijelaskan di atas sehingga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan PTS tersebut tidak terlepas peran dari manajemen keuangan dalam mengatur pengelolaan sumber dan alokasi dana agar kegiatan yang ada dalam dimensi korporasi tersebut di atas dapat terselenggara dengan baik.

Adapun pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan pengelolaan dana mulai dari penentuan sumber dana yang diperlukan dengan biaya yang ekonomis, pengalokasian dana yang efektif dan efisien dari sumber dana yang telah diperoleh, serta kebijakan tentang pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh (baca: laba untuk perusahaan, sisa hasil usaha untuk lembaga pendidikan yang mempunyai prinsip usaha nirlaba). Sedangkan menurut Husnan (Wijaya, 2009) menyebutkan bahwa manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab di dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana serta mendapatkan dana.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa manajemen keuangan PTS merupakan manajemen dana yang dimiliki oleh PTS yaitu kegiatan penentuan perolehan dana dari berbagai sumber dengan biaya yang ekonomis dan penggunaan dana tersebut dalam pemberian layanan pendidikan tinggi kepada pelanggan PTS

secara efektif dan efisien serta memanfaatkan nilai lebih (sisa hasil usaha) yang diperoleh dari pemberian jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan (pengembangan PTS).

Manajemen keuangan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh kegiatan akuntansi, baik akuntansi keuangan (laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal maupun laporan arus kas), akuntansi biaya (perhitungan harga pokok produksi persatuan dan laporan biaya produksi produksi) maupun akuntansi manajemen (perhitungan analisis pulang pokok, analisis perilaku biaya, analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus) dalam melakukan analisis untuk setiap pengambilan keputusannya.

Siklus Manajemen Keuangan Pendidikan Tinggi Swasta

Siklus manajemen keuangan sekolah menurut Bastian (2007) dalam perspektif akuntansi melalui beberapa tahapan yang dapat dilihat pada gambar

Berdasarkan siklus manajemen keuangan sekolah maka dapat diadopsi siklus manajemen keuangan untuk PTS sebagai berikut:

1. Anggaran Pendidikan

Anggaran adalah perencanaan besarnya dana dan biaya yang dibutuhkan PT dalam melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan rencana kerja pertahun.

2. Pola Subsidi Pendidikan

Subsidi pendidikan merupakan sumber pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat untuk membiayai aktivitas investasi fisik dan nonfisik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu layanan sekolah. (Wijaya, 2009). Pembiayaan untuk aktivitas investasi fisik dan nonfisik dalam PTS sebagian besar bersumber dari investasi masyarakat.

3. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pendidikan

Berdasarkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja pendidikan maka *Stakeholders* PTS dapat mengetahui secara jelas tentang sejauh mana keberhasilan kerja PTS dalam merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rencana kerja pada periode berikutnya. Disamping itu juga sebagai sarana akuntabilitas pada sektor public mengenai tanggungjawab PTS dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi yang dijanjikan kepada masyarakat.

4. Costing and Pricing Jasa Pendidikan

Menurut James dan Phillips (Wijaya, 2009), unsur-unsur biaya dan penetapan harga jasa pendidikan meliputi pertama ialah **pembiayaan (*costing*) jasa pendidikan**, yaitu membandingkan pengeluaran sekolah dengan manfaatnya bagi pelanggan jasa pendidikan. Kedua **penetapan harga (*pricing*) jasa pendidikan**, yaitu penerima jasa pendidikan akan dikenakan harga jasa pendidikan tertentu sesuai dengan tujuan sekolah. Ada tiga aspek penetapan harga jasa pendidikan, yaitu: **(1)** diferensiasi jasa pendidikan; **(2)** faktor-faktor penentu harga jasa pendidikan; serta **(3)** biaya pengembangan produk jasa pendidikan.

5. Audit Keuangan Pendidikan

Audit keuangan pendidikan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sekolah secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

6. Audit Kinerja Pendidikan

Menurut Sagala (Wijaya, 2009) menjelaskan audit kinerja merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menafsirkan informasi, dengan tujuan menyimpulkan peringkat kompetensi seseorang dalam satu jenis keahlian profesi pendidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut di dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang direkomendasikan.

Penetapan Biaya Satuan Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juanda dan Lestari (2012) menunjukkan bahwa setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan informasi biaya satuan agar dapat mengetahui apakah kegiatan usahanya menghasilkan sisa hasil usaha ataukah tidak, sehingga dapat dilakukan perencanaan serta pengendalian dalam manajemen keuangan. Setiap manajemen keuangan pada masing-masing lembaga pendidikan juga mempengaruhi biaya satuan (unit cost) yang harus dikeluarkan dan juga biaya yang harus dibebankan pada setiap mahasiswa.

Penetapan biaya satuan pendidikan dapat menggunakan metode *Activity Based Costing System (ABC System)* yaitu metode perhitungan harga pokok yang didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas menggunakan sumber daya sedangkan produk mengkonsumsi aktivitas.(Halim, dkk, 2013)

Adapun tahapan dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasikan produk yang menjadi objek biaya
2. Hitung biaya langsung dari produk
3. Pilih dasar pengalokasian biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk
4. Identifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya.
5. Hitung tarif perunit dasar alokasi biaya guna mengalokasikan biaya tak langsung ke produk
6. Hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk
7. Hitung total biaya produk dengan menjumlahkan semua biaya langsung dan tidak langsung.(Widilestariningtyas,dkk, 2012)

Menurut Fatah (Wijaya, 2009) menyebutkan ada 2 (dua) pendekatan dalam menentukan biaya satuan pendidikan, yaitu:

1. Pendekatan makro

Kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan pada setiap negara yaitu membandingkan biaya operasional pendidikan dengan sumber keuangan yang dapat dilihat dalam persentase GNP setiap Negara.

2. Pendekatan mikro

Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total serta jumlah biaya satuan menurut jenis dan jenjang pendidikan.

3.1 Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan PTS

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 58, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus.

Prinsip-prinsip umum meliputi keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

1. Keadilan berarti memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, suku, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
2. Efisiensi artinya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan.
3. Transparansi berarti memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 - a. Dapat diaudit sesuai standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian

- b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- c. Akuntabilitas publik berarti memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan prinsip-prinsip khusus meliputi:

1. efektivitas, Manajemen keuangan PTS dapat dikatakan efektif apabila pimpinan PTS dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas layanan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan PTS yang bersangkutan serta hasil kualitatifnya sesuai dengan rencana PTS yang telah ditetapkan.
2. kecukupan, berarti pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
3. Keberlanjutan, berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. (Wijaya, 2009)

Peran Manajemen Keuangan Dalam Mengukur Kinerja PTS

Semua organisasi nirlaba menerima dana dari bermacam-macam sumber untuk membiayai pelaksanaan misinya. Organisasi yang terus menerus mampu mengumpulkan dana yang melebihi atau mampu menutupi pembiayaan usaha nirlaba tersebut, akan berhasil. Sebaliknya organisasi yang dalam waktu yang lama selalu mengalami defisit, akan gagal melaksanakan misinya. Kecukupan dana untuk melaksanakan kegiatan, baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nirlaba, tidak hanya tergantung dari banyaknya dana yang dapat dikumpulkan, tetapi juga dari kemampuan mengelola dana tersebut sehingga untuk itulah diperlukan manajemen keuangan.

Penyusunan ukuran kinerja PTS berdasarkan manajemen keuangan, dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. **kinerja operasi**, rasio ini dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa baik suatu kegiatan itu dilakukan. Termasuk didalamnya rasio pengukur pendapatan dari suatu investasi (*return on investment*). Beberapa ukuran yang dapat digunakan dalam kelompok kinerja operasi keuangan antara lain ialah tingkat atau rasio surplus, biaya rata-rata per mahasiswa, rasio sumbangan mahasiswa, rasio pendapatan kegiatan usaha, peredaran persediaan, peredaran hutang, peredaran piutang, dan rasio beban tetap.
2. **posisi keuangan**, Rasio ini menunjukkan posisi keuangan organisasi, yang dibedakan antara kemampuan membayar hutang jangka pendek (likuiditas) dan kemampuan membayar hutang jangka panjang (solvabilitas).
3. **nilai PTS**. Nilai PTS dapat dilihat pada segi nilai aset, penilaian akuntan publik, nilai atau tingkat pengumpulan dana abadi, dan nilai paten yang dimiliki. Nilai tersebut ada yang mempunyai nilai uang tetapi ada juga bernilai nonkeuangan.
 - **Pengembangan Nilai Aset** adalah pergerakan nilai seluruh aset dari tahun ke tahun, apakah bertambah, berkurang, atau sama saja. Data ini diambil dari nilai seluruh aset di neraca keuangan dari beberapa tahun terakhir, sehingga didapat salah satu dari kecenderungan tersebut. Diharapkan tentu saja bahwa kecenderungan nilai aset ini makin bertambah yang menunjukkan bertambahnya kekayaan organisasi.
 - **Nilai Aset per Karyawan** adalah nilai rata-rata aset per karyawan, dihitung dari nilai keseluruhan aset seperti tampak di neraca keuangan dibagi dengan jumlah karyawan tetap pada tahun bersangkutan. Ini menunjukkan efisiensi dalam mempekerjakan karyawan.
 - **Tingkat Dana Abadi** adalah sejumlah dana yang jumlahnya dipertahankan atau makin lama makin ditambah, yang tidak boleh diusik-usik, yang merupakan sumber pembelanjaan organisasi untuk waktu yang panjang. Dana

ini ditanam dalam bentuk deposito berjangka, atau saham, reksa dana, obligasi, atau bentuk surat berharga lain. Tingkat dana abadi dapat dihitung secara absolut, tetapi lebih baik dihitung secara relatif, yaitu misalnya rasio antara nilai dana abadi dan seluruh nilai aset, atau rasio antara dana abadi dengan nilai anggaran tahunan.

- **Nilai Paten.** Hasil penelitian PTS yang dipatenkan mempunyai nilai uang dan ini merupakan kekayaan PTS. Jumlah dan nilai paten menunjukkan mutu dan nilai PTS.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, dapat di buat kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi Swasta memerlukan manajemen keuangan untuk mengukur seberapa jauh kinerja yang sudah dicapai oleh organisasi dalam melakukan aktivitas pemberian layanan pendidikan.
2. Pengukuran kinerja PTS dalam manajemen keuangan melalui 3 pendekatan yaitu kinerja operasi, posisi keuangan dan nilai PTS.

Perguruan tinggi sebaiknya memanfaatkan manajemen keuangan dalam pengelolaannya, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengukur kinerja perguruan tinggi dalam memberikan layanan Pendidikan. Melalui manajemen keuangan arah kebijakan yang akan dibuat oleh perguruan tinggi akan lebih jelas sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki perguruan tinggi dalam mengelola kegiatannya yang berusaha untuk menjadi lembaga layanan Pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Bambang Supomo dan Muhammad Syam Kusufi (2013). Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Ahmad Juanda dan Nikki Vertik Lestari (2012). Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran (Studi Kasus Pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang). Jurnal Reviu Akutansi dan Keuangan. Vol 2. Nomor 1. ISSN:2088-0685
- David Wijaya (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Penabur. No. 13. (<http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%208096%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf>). diakses pada tanggal 1 Juni 2014.
- Indra Bastian (2007). Akuntansi Pendidikan. Jakarta: Erlangga
- Ony Widilestariningtyas, Sri Dewi Anggadini dan Dony Waluya Firdaus (2012). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto (2004). Manajemen Perguruan Tinggi Modern. Jakarta: REI-eBook